

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI BELANJA
DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KABUPATEN
MINAHASA SELATAN (2005-2014)**

Reggie W. Mononimbar, Een N. Walewangko, Jacline Sumual
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email: reggiemono@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variabel intervening. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang di ambil selama kurun waktu 10 tahun, mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2014. Data-data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil regresi pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil regresi kedua menunjukkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah, dan Petumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

This research is conducted to know the influence of Regional Tax and Regional Retribution on Economic Growth through Regional Expenditure as intervening variable. Population in this research is South Minahasa Regency. The study used realization data of Regional Expenditure Budget (APBD) taken during the period of 10 years, starting from 2005 to 2014. These data were obtained from Dinas Pendapatn Daerah (Dispenda). The results of the first regression indicate that there is influence between the Regional Tax has significant effect on the Regional Expenditure, while the Levy does not affect the Regional Expenditure. The results of the second regression show that Regional Tax, Regional Retribution and Regional Expenditure together have no influence on Economic Growth.

Keywords: Local Tax, Regional Retribution, Regional Expenditure, and Economic Growth.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah khususnya daerah kota/kabupaten merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Menurut Blakely (dalam Kuncoro,2004), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Belanja Daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.. Pengeluaran rutin merupakan belanja yang penggunaannya untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Pengeluaran pembangunan merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat.

Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dikelolanya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah masing-masing dalam rangka perwujudan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah keinginan masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh factor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi seperti : sumber alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian tenaga kerja, dan skala produksi. Faktor non-ekonomi seperti : social, manusia, politik, dan administrative. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode biasanya satu tahun.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Djojohadikusumo (1993) dalam pertumbuhan ekonomi biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sarana dan prasarana produksi. Menurut Schumpeter dalam Boediono (1992) pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Pajak Daerah

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak menurut beberapa ahli,

Retribusi Daerah

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir 26 diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2002). Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretraris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Dedy Haryadi et al, 2001 dalam Pratiwi, 2007).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa rill terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah (Ayuningtyas, 2008:2).

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Marihot P. Siahaan Retribusi Daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan. Menurut Ahma d Yani Daerah provinsi, kabupaten atau kota diberi peluang didalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan melalui menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan tersebut , sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah

Mardiasmo dkk, (2000:3-4) menyatakan bahwa sisi pendapatan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan antara variable Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variable intervening.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Kabupaten Minahasa Selatan dengan pengambilan data melalui (*DISPENDA Minsel & BPS Minsel*) untuk pengambilan data penelitian. Waktu penelitian adalah dari tahun 2005-2014.

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Variabel adalah subjek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikuto, 1998:33). Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009), dihitung dalam satuan rupiah/tahun.
2. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009), dihitung dalam satuan rupiah/tahun
3. Belanja Daerah Menurut IASC Framework (Halim, 2002 : 73), “Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana”. Dihitung dalam satuan rupiah/tahun.
4. Pertumbuhan Ekonomi (Sadono Sukirno) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Sehingga untuk mengetahuinya harus diadakan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t)

Nilai t hitung digunakan untuk menguji apakah variable tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variable tergantung atau tidak. Suatu variable akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai hitung variable tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t table (Suliyanto.2011).

Untuk menghitung nilai t hitung digunakan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{\beta}{S(\beta)}$$

$$t_{\text{tabel}} = n-k-1$$

Dimana :

1 = koefisien regresi variable independen ke-i

Se = standar error dari variable independen ke-i

N = jumlah data

K = jumlah variable

Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi dari variable terikat. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan menggunakan formula :

$$R^2 = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum y_i^2}$$

Uji Signifikansi Simultan (uji statistic F)

Nilai f hitung digunakan untuk menguji ketepatan model (*goodness of fit*). Uji F ini juga sering disebut sebagai uji simultan, untuk menguji apakah variable bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variable tergantung atau tidak. Untuk menyimpulkan model masuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak, kita harus membandingkan nilai F hitung dengan nilai F table dengan derajat kebebasan: df: , (k-1). Nilai hitung dapat diperoleh dengan rumus : (Suliyanto.2011)

Rumus nilai F hitung :

$$F = \frac{R^2/k-1}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Dimana : F = Nilai F hitung

R^2 = Koefisien determinasi

N = Jumlah observasi

K = Jumlah variable

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji Heteroskedastisitas, uji Autokorelasi dan uji Multikolineartitas terhadap data.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan grafik plot diantara nilai prediksi variable dependen yaitu ZPRED dengan residual SRESID Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2011:110)

Uji Multikolinieritas

Menurut (Ghozali, 2011 : 105-106) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variable independen, jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Path. Yaitu untuk mengetahui Pengaruh variable Exogenus terhadap variabel Dependen Endogenus.

Analisis Path

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Menurut Riduwan dan Kuncoro (2007, pp2-3) Path Analysis digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variable dengan tujuan mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung sepereangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variable terikat (endogen).

Manfaat Analisis Jalur

Ada beberapa manfaat dari model path analysis, antara lain :

1. Untuk penjelasan terhadap fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang diteliti.
2. Untuk prediksi nilai variable terikat (Y) berdasarkan nilai variable bebas (X) dan prediksi ini bersifat kualitatif.
3. Faktor detreminan yaitu penentuan variable bebas (X) yang mempengaruhi dominan terhadap variable terikat (Y), juga dapat digunakan untuk menelusuri (jalur-jalur) pengaruh variable bebas (X) terhadap variable terikat (Y).
4. Pengujian model, menggunakan theory trimming, baik untuk uji reliabilitas (uji keajegan) yang sudah ada ataupun uji pengembangan konsep baru.

Asumsi-asumsi Analisis Jalur

Berikut ini asumsi-asumsi yang mendasari path analysis (menurut Riduwan dan Kuncowo, 2007,p2) yaitu :

- a. Pada model path analysis, hubungan antara variable adalah bersifat linier, adaptif, dan bersifat normal.
- b. Hanya system aliran kausal ke satu arah, artinya tidak ada arah kausal yang berbalik.
- c. Variabel terikat (endogen) minimal dalam skala ukur interval dan ratio.
- d. Menggunakan sampel probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
- e. Observed variables diukur tanpa kesalahan (instrument pengukuran valid dan reliable) artinya variabel yang diteliti dapat diobservasi secara langsung.
- f. Model yang dianalisis dispesifikasi (diidentifikasi) dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan artinya model teori yang dikaji atau diuji dibangun berdasarkan kerangka teoritis tertentu yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variable yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Berganda Struktur

Uji t

Hasil Uji t dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 4.4 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.726	.590		11.406	.000
	Pajak Daerah	.451	.032	.961	14.042	.000
	Retribusi Daerah	.067	.066	.070	1.020	.342

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan data output SPSS dalam table ini maka dapat diberi interpretasi sebagai berikut :

- Persamaan regresi dari penelitian ini adalah $Y = 6.726 + 0.451X_1 + 0.067X_2$
- Nilai konstanta sebesar 6.726 mengandung arti bahwa jika nilai jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 0, maka Belanja Daerah akan sebesar 6.726 (tetap)
- Nilai koefisien regresi X_1 sebesar 0.451, mengandung arti bahwa jika jumlah Pajak Daerah bertambah sebesar 1 satuan, maka Belanja Daerah naik sebesar 0.451
- Nilai koefisien regresi X_2 sebesar 0.067, mengandung arti bahwa jika jumlah Retribusi Daerah bertambah sebesar 1 satuan, maka Belanja Daerah naik sebesar 0.067
- Nilai t hitung Pajak Daerah adalah 14.042 dan nilai t hitung Retribusi Daerah adalah 1.020. Nilai t table 1,895 yang diperoleh dengan alpha 5% dan df sebesar 2 yakni (10-2-1). Pada sisi lain nilai signifikannya X_1 (sig) 0.00 atau lebih kecil dari alpha sebesar 0,05. Oleh karena nilai t hitung lebih besar dari t table, dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
- Pada nilai signifikannya X_2 (sig) adalah 0.345, atau lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,05. Oleh karena t hitung lebih kecil dari t table, dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.5 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.985 ^a	.971	.962	.02012	1.701

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

- Nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,985. Besaran nilai koefisien korelasi ini mengandung arti bahwa keeratan hubungan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai variable bebas dengan Belanja Daerah sebagai variable terikat adalah sangat erat dan bersifat positif
- Nilai koefisien determinasi sebesar 0,971 atau 97.1 persen. Besaran nilai koefisien determinasi sebesar 97.1 persen mengandung arti bahwa kontribusi atau sumbangan variable

Pajak Daerah bersama-sama terhadap Belanja Daerah sebesar 97 persen, sedangkan sisanya 0,3 persen disumbangkan oleh variable lain.

Uji F

Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.6 ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.093	2	.047	115.172	.000 ^a
	Residual	.003	7	.000		
	Total	.096	9			

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

- Nilai F hitung sebesar 115.172 dengan signifikansi 0.000. Nilai F table 5% dengan jumlah variable bebas (V1) = 2 dan jumlah sampel 10, maka diperoleh F table 4.10. nilai F hitung (115.172) lebih besar dari f table (4.10). Berdasarkan hasil uji F maka variable bebas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah.

Hasil Analisis Regresi Berganda Struktur 2

Uji T

Hasil uji t dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.7 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-200.541	146.694		-1.367	.221
Pajak Daerah	-13.022	9.753	-2.438	-1.335	.230
Retribusi Daerah	-5.542	3.985	-.504	-1.391	.214
Belanja Daerah	32.794	21.247	2.882	1.543	.174

Berdasarkan data output SPSS dalam table ini maka dapat diberi interpretasi sebagai berikut :

- Persamaan regresi dari penelitian ini adalah $Y = -200.542 + -13.022X1 + -5.542X2 + 32.794X3$
- Nilai konstanta sebesar -200.541 mengandung arti bahwa jika nilai jumlah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah adalah sebesar 0, maka Pertumbuhan Ekonomi akan sebesar -200.541 (tetap)
- Nilai keofisien regresi X1 sebesar -13.022, mengandung arti bahwa jika jumlah Pajak Daerah bertambah sebesar 1 satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar -13.022
- Nilai keofisien regresi X2 sebesar -5.542, mengandung arti bahwa jika jumlah Pajak Daerah bertambah sebesar 1 satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar -5.542

- Nilai koefisien regresi X3 sebesar 32.794, mengandung arti bahwa jika jumlah Belanja Daerah bertambah sebesar 1 satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 32.794
- Nilai t hitung Pajak Daerah adalah -1.335, nilai t hitung Retribusi Daerah adalah -1.391 dan nilai t hitung Belanja Daerah adalah 1.543. Nilai t table 1,944 yang diperoleh dengan alpha 5% dan df sebesar 2 yakni (10-3-1). Pada sisi lain nilai signifikannya X1 (sig) 0.221 atau lebih besar dari alpha sebesar 0,05. Oleh karena nilai t hitung lebih kecil dari t table, dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Pada nilai signifikannya X2 (sig) adalah 0.214, atau lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,05. Oleh karena t hitung lebih kecil dari t table, dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Pada nilai signifikannya X3 (sig) adalah 0.174, atau lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,05. Oleh karena t hitung lebih kecil dari t table, dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti Belanja Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji keodisien determinasi dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 4.8 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.619 ^a	.383	.075	1.13107	1.322

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

- Nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,619. Besaran nilai koefisien korelasi ini mengandung arti bahwa keeratan hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah sebagai variable bebas dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variable terikat adalah sangat erat dan bersifat positif.
- Nilai koefisien determinasi sebesar 0.383 atau 38.1 persen. Besaran nilai koefisien determinasi sebesar 38.1 persen mengandung arti bahwa kontribusi atau sumbangan variable Pajak Daerah bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 38 persen, sedangkan sisanya 0,62 persen disumbangkan oleh variable lain.

Uji F

Hasil uji F dari penelitian ini dapat dilihat pada table berikut

Tabel 4.9 ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.765	3	1.588	1.242	.374 ^a
	Residual	7.676	6	1.279		
	Total	12.441	9			

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

- Nilai F hitung sebesar 1.242 dengan signifikansi 0.374. Nilai F table 5% dengan jumlah variable bebas ($V1$) = 3 dan jumlah sampel 10, maka diperoleh F table 3.71. nilai F hitung (1.242) lebih kecil dari f table (3.71). Berdasarkan hasil uji F maka variable bebas Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Uji Asumsi Klasik

Multikolinearitas

Tabel 4.10 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-200.541	146.694		-1.367	.221		
Pajak Daerah	-13.022	9.753	-2.438	-1.335	.230	.031	32.413
Retribusi Daerah	-5.542	3.985	-.504	-1.391	.214	.783	1.276
Belanja Daerah	32.794	21.247	2.882	1.543	.174	.029	33.906

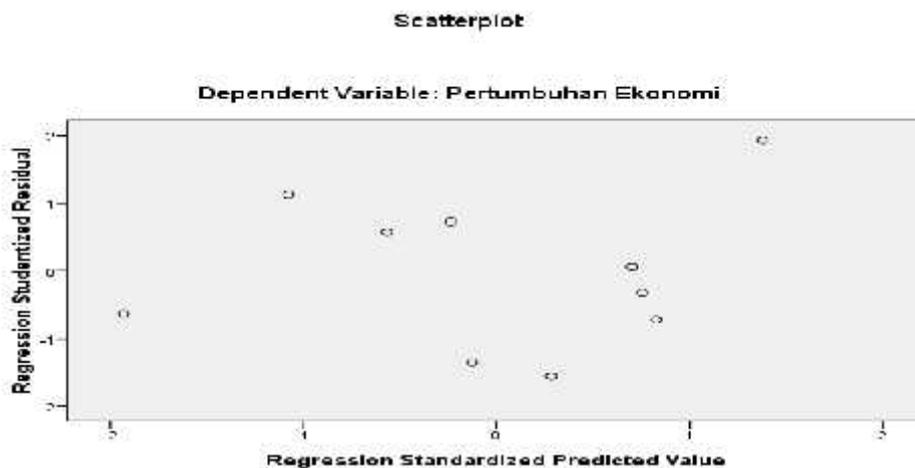
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

- Berdasarkan hasil perbaikan model penelitian sebagaimana yang tercantum dalam table di atas maka variable bebas yang akan digunakan dalam persamaan regresi penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah. Hal ini di dasarkan pada hasil uji nilai VIF yang menunjukkan besarnya nilai VIF antara X1 Pajak Daerah 32.413, X2 Retribusi Daerah 1.276, X3 Belanja Daerah 32.794.
- Aturan dalam program SPSS bahwa jika variable bebas lebih kecil dari angka 10. Maka variable X2 Retribusi Daerah 1.276 tidak mengandung multikolinearitas.

Heteroskedastisitas

Variabel bebas penelitian yang telah bersih dari gejala multikolinearitas diuji kembali dengan pengujian heteroskedastisitas. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Kurva Uji Heteroskedastisitas hasil Model Penelitian



- Berdasarkan gambar 4.4 Kurva uji heteroskedastisitas hasil perbaikan model maka terlihat residu adalah tidak teratur dengan plot yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala homokedastisitas dalam model penelitian, sehingga dengan demikian persamaan regresi yang akan digunakan telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas yakni varians dari residual dari suatu pengamatan ke

pengamatan yang lain tidak memiliki kesamaan atau tidak membentuk pola tertentu sebagaimana yang terlihat dalam scatterplot di atas.

Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dalam model penelitian, dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.11 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.619 ^a	.383	.075	1.13107	1.322

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis penelitian table ini menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (d) adalah sebesar 1.322. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam model penelitian maka dilakukan perbandingan dengan nilai Durbin-Watson pada table. Dengan jumlah variable bebas (k) = 3 dan jumlah sampel (n) = 10 pada $\alpha = 5\%$ maka diperoleh nilai d_L sebesar 0.525 dan nilai d_U sebesar 2.016. Melalui aturan pengujian : $d_U < DW < d_L$ yakni $0.525 < 1.322 < 2.016$. Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa berada didaerah keraguan masalah autokorelasi dalam model penelitian

Hasil Analisis Jalur

Pengaruh langsung

- pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah X1 ke X3 = 0.451
- pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah X2 ke X3 = 0.067
- pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi X1 ke Y = -13.022
- pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi X2 ke Y = -5.542
- pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi X3 ke Y = 32.794

Pengaruh tidak langsung

- pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variable intervening $X1X3 \times X3Y = 0.451 \times 32.794 = 14.,790$
- pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variable intervening $X2X3 \times X3Y = 0.067 \times 32.794 = 2,197$

4. PENUTUP

Setelah membahas dan melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh dalam peneitian ini, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan didalamnya dan berdasarkan kesimpulan yang ada terdapat beberapa saran yang dapat penulis kemukakan.

Kesimpulan

1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Saran

1. Agar target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah dapat terealisasi dengan baik, aparat dari instansi-instansi terkait perlu membuat strategi supaya potensi dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah itu sendiri dapat tergali dengan maksimal.
2. Diperlukan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana perlu diadakannya penyuluhan tentang pentingnya kewajiban membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Diberlakukannya sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar pengumpul atau pemungut pajak atau retribusi.
4. Kualitas aparat daerah dan pelayanan terhadap masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi. Seri synopsis. Edisi Pertama. Cetakan pertama. BPFE. Yogyakarta*
- Dispenda Minahasa Selatan. *Pajak daerah, retribusi daerah, belanja daerah 2005-2014*
- Halim (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi, Revisi, Jakarta, Salemba Empat*
- Kaho (2001). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.*
- Mardiasmo (2000) *Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah. Yogyakarta : Andi*
- Todaro & Smith (2006). *Pembangunan Ekonomi. Jakarta. Erlangga*
- Waluyo (2011 :6). *Perpajakan Indonesia. Buku 1 Edisi Revisi 5. Penerbit Salemba Empat . Jakarta*
- Undang – undang Pasal 1 no.28. *Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*
- Undang - undang No. 18 Tahun 1997. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*